

Fasilitasi Pembiayaan Mendukung Hilirisasi Inovasi Bibit Unggul Ternak (Financial Facilitation to Support Commercialization of Superior Breed Innovation)

Atien Priyanti dan N Chasanah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Jl. Raya Pajajaran Kav E59 Bogor 16128. Indonesia
Kontributor utama: atienpriyanti@yahoo.com

(Diterima 19 Juli 2022 – Direvisi 15 Agustus 2022 – Disetujui 5 September 2022)

ABSTRACT

Livestock products innovation, especially of those superior breeds have become one of the solutions in the development of livestock production, because the availability of good quality breed is very limited. Indonesian Agency of Agricultural Research and Development through Indonesian Center for Animal Research and Development Implementing Units have responded these needs through breeding research activities since the early 2000s. These efforts have produced some superior local breeds, i.e. beef cattle, sheep, goats, chicken, duck and rabbit that are ready to be disseminated to the community in order to contribute to protein consumption fulfillment from livestock. Massive distribution of livestock superior seeds is expected to expand the range of their use in the community and lead to increased production. One of the determinant factors to develop the process of its development is availability of financial access, which most farmers in general are very much constrained by capital asset. Therefore, facilitation support is needed to increase capital capacity that can accommodates the business characteristics. Objective of the manuscript is to review of facilitation support needed of the superior breed innovative research that disseminate to maintain sustainability of its development. In recent years, the Government has launched program of People's Business Credit (KUR) that could be optimized to scaling up farmers' farming with good quality breed. As a banking product, the accessibility of KUR requires an economically feasible business scale so that business guarantees can be sustainable with adequate cash flow. Meanwhile, livestock farmings are still dominated by small scale farmers and not yet for production oriented to reach its profitability. Supervision and technical guidances need to be consistently assisted to farmers as prospectuous KUR debtor program in order to accelerate the process on disbursement of credit to supply their capital asset.

Key words: KUR, commercialization, innovation, superior breed, livestock

ABSTRAK

Inovasi produk peternakan, terutama bibit unggul ternak menjadi salah satu solusi dalam pengembangan usaha peternakan, karena jumlah bibit ternak berkualitas masih terbatas. Badan Litbang Pertanian melalui Unit Kerja Puslitbang Peternakan telah merespon kebutuhan bibit unggul beberapa ternak lokal melalui serangkaian kegiatan riset pemuliaan sejak awal tahun 2000-an. Upaya tersebut telah menghasilkan bibit unggul ternak untuk sapi potong, domba, kambing, ayam, itik dan kelinci yang siap dikembangkan dan didiseminasikan kepada masyarakat guna berkontribusi terhadap pemenuhan konsumsi protein asal ternak. Penyebaran bibit unggul ternak secara *massive* diharapkan dapat memperluas jangkauan pemanfaatannya di masyarakat dan bermuara pada peningkatan produksi. Dalam proses pengembangannya di masyarakat, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor utama yang sangat diperlukan sekaligus menjadi faktor pembatas peternak selama ini. Oleh karenanya, diperlukan dukungan fasilitasi peningkatan kapasitas permodalan yang dapat mengakomodir karakteristik usahanya. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan ulasan terkait dengan upaya fasilitasi proses diseminasi inovasi bibit unggul ternak hasil riset untuk mendukung pengembangan di masyarakat yang berkelanjutan. Saat ini, pemerintah telah me-*launching* Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dimanfaatkan oleh peternak dalam mengembangkan usahanya dengan bibit berkualitas. Sebagai produk perbankan, aksesibilitas KUR menuntut skala usaha yang layak secara ekonomi sehingga jaminan usaha dapat berkesinambungan dengan arus kas (*cash flow*) yang memadai. Di sisi lain, usaha peternakan selama ini masih didominasi oleh pelaku usaha skala rakyat sehingga belum memenuhi kaidah produksi yang berorientasi pada optimalisasi keuntungan. Fasilitasi permodalan juga perlu diikuti dengan pendampingan dan asistensi kepada para peternak sebagai calon debitur pengusul KUR guna mempercepat proses perolehan modal bagi peternak.

Kata kunci: KUR, hilirisasi, inovasi, bibit unggul, peternakan

PENDAHULUAN

Produk pangan asal ternak merupakan sumber protein hewani penting dalam struktur pangan yang

memberikan andil besar terhadap perbaikan gizi masyarakat dan relevan dengan program pemerintah dalam membangun masa depan sumber daya manusia yang berkualitas. Selama satu dekade terakhir, produk pangan asal ternak seperti daging, telur, dan susu

mengalami perkembangan yang dinamis. Total produksi pangan asal ternak sampai dengan tahun 2020 berkontribusi secara berturut-turut sebesar 41,60%; 49,97%; dan 8,43% untuk daging, telur dan susu. Telur mengalami perkembangan paling signifikan dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 21,92% dengan produksi sebesar 5,62 juta ton, dimana sebagian besar diperoleh dari telur ayam ras (89,80%). Dominasi ayam ras juga terjadi pada produksi daging nasional dengan kontribusi 70,05% dari total produksi sebesar 4,68 juta ton. Selama periode tersebut, produksi daging nasional mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,46%. Dalam perkembangannya, daging dan telur sempat mengalami puncak produksi pada tahun 2017 namun mengalami penurunan sangat signifikan, bahkan produksi daging mencapai pertumbuhan -4,31% pada akhir periode. Pertumbuhan yang negatif (-4,89%) juga terjadi pada produksi susu, menghasilkan pertumbuhan rata-rata yang masih sebesar -0,02% pada angka produksi 947,70 juta ton pada tahun 2020 (Ditjen PKH 2015; 2020).

Selain daging dan telur ayam ras, komoditas pendamping utama lainnya berdasarkan persentase kontribusinya dalam struktur produksi nasional adalah daging sapi, daging babi, daging ayam buras, serta telur ayam buras dan itik. Selain komoditas-komoditas tersebut, daging domba menjadi produk potensial yang justru menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan (42,95%) selama satu dekade terakhir meskipun masih memberikan kontribusi yang tidak terlalu tinggi (Ditjen PKH 2020). Hal ini seiring dengan mulai terbukanya pasar ekspor kambing dan domba ke beberapa negara utama seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Pangsa pasar utama lainnya adalah beberapa negara Timur Tengah (khususnya Arab Saudi) dengan permintaan untuk pemenuhan kebutuhan kurban sampai dengan 3 juta ekor per tahun yang sampai saat ini masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya. Dengan asumsi kebutuhan dalam negeri tercukupi, Indonesia baru dapat memproyeksikan pertumbuhan ekspor sebesar 20% dengan capaian tingkat kemampuan ekspor keduanya mencapai 1,5 juta ekor pada tahun 2021 (Noor & Hidayat 2017).

Meski demikian, secara umum neraca perdagangan produk peternakan masih defisit sebesar US\$ 3.201,2 juta (5,22%) pada tahun 2019. Hal ini diikuti dengan penurunan rasio nilai ekspor terhadap nilai impor setahun sebelumnya yang menurun dari 1:5,8 menjadi 1:5,3 (Ditjen PKH 2020). Kondisi tersebut disebabkan oleh kecenderungan semakin meningkatnya importasi produk impor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kenaikan konsumsi pangan asal ternak meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, tingkat sosialisasi dan kesadaran asupan gizi seimbang, peningkatan pendapatan, serta perubahan gaya hidup masyarakat

(Priyanti et al. 2017). Sampai saat ini, hanya daging ayam ras, telur ayam ras, serta daging kambing dan domba dari beberapa komoditas utama peternakan yang tercatat mengalami neraca surplus. Sementara itu, daging sapi sebagai sumber utama daging merah masih mengalami proyeksi defisit sampai dengan 268 ribu ton pada tahun 2024. Defisit masih terus terjadi karena laju peningkatan produksi secara umum masih lebih rendah dibandingkan laju peningkatan konsumsinya (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2020a; 2020b; 2020c; 2020d).

Dalam rangka mengupayakan substitusi impor, pemerintah telah mengupayakan percepatan peningkatan produksi melalui berbagai kebijakan seperti Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Andalan Dalam Negeri) dan Integrasi Tanaman-Ternak untuk peningkatan populasi ternak. Dari sisi riset, pemerintah terus mengupayakan produk inovasi bibit unggul ternak hasil pemuliaan melalui pemanfaatan keragaman sumber daya genetik. Melalui satuan kerja di bawah lingkupnya, Badan Litbang Pertanian melakukan perbanyakan dan diseminasi hasil inovasi tersebut di dalam sebuah kelembagaan perbibitan Unit Pengelola Benih Sumber/Bibit Unggul (UPBS/BU). Di samping itu, Badan Litbang Pertanian juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga pemegang lisensi untuk masalisasi hasil inovasi kepada masyarakat (Priyanti et al. 2020).

Dari sisi pelakunya, pengembangan produk inovasi khususnya bibit ternak unggul menghadapi tantangan lemahnya kapasitas permodalan di tingkat peternak karena usaha yang masih parsial dan belum memenuhi kaidah kelayakan secara ekonomi. Hal ini menyebabkan gap manfaat ekonomi dari pemanfaatan bibit unggul di masyarakat dari potensi optimalnya. Sebagai dukungan terhadap sektor produksi mikro termasuk usaha ternak yang mandiri dan berkelanjutan, sejak tahun 2007 pemerintah telah *me-launching* program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi tingkat suku bunga rendah. Dalam perkembangannya, implementasi KUR dari aspek kebijakan terbagi menjadi empat periode yakni: (i) Kebijakan KUR periode Skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) (2007-2014), (ii) Kebijakan KUR periode Skema Subsidi Bunga/Margin (2015-2020), (iii) Kebijakan KUR di masa pandemi Covid-19, dan (iv) Kebijakan KUR tahun 2021 sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Perubahan skema KUR dari IJP ke subsidi bunga/margin hingga saat ini menghasilkan penetapan suku bunga menjadi *single digit* dari 12% menjadi 9%. Kebijakan dilanjutkan dengan penetapan suku bunga 6% melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Akibat Pandemi Covid-19, kebijakan kembali mengalami perubahan dengan ditetapkan suku bunga 6%

sampai 31 Desember 2020 yang dilanjutkan dengan perpanjangan relaksasi pada tingkat bunga 3% sampai dengan 31 Desember 2021.

Dinamika perubahan kebijakan KUR mengakomodir fokus pemerintah terhadap penyaluran pembiayaan untuk sektor produksi. KUR untuk sektor produksi (non perdagangan) yang dialokasikan minimal 40% pada tahun 2017, 50% pada tahun 2018, dan 60% pada tahun 2019 dan 2020, termasuk di dalamnya mencakup sektor pertanian termasuk subsektor peternakan. Berfokus pada subsektor dengan penciri masih terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia, implementasi program KUR berdampingan dengan upaya diseminasi hasil inovasi riset peternakan memerlukan pendampingan dan asistensi yang intensif. Makalah ini disusun untuk memberikan ulasan tentang fasilitasi pembiayaan melalui KUR dalam upaya pendampingan dan asistensi teknis untuk menjamin karakteristik usaha ternak dapat terakomodir dan diterjemahkan dengan baik ke dalam skema pembiayaan dalam format perbankan yang ada. Kasus yang diangkat dalam ulasan kali ini secara komprehensif telah dilakukan pada pengembangan Ayam KUB, namun inovasi galur maupun rumpun ternak sebagai bibit unggul layak untuk memperoleh layanan KUR dalam proses pengembangannya. Diharapkan melalui proses yang telah dilakukan pada Ayam KUB, dapat menjadi *lesson learned* bagi bibit unggul ternak lainnya sesuai dengan karakteristik usaha pengembangannya. Seluruh inovasi galur ataupun rumpun ternak sebagai bibit unggul secara ekonomi telah dikaji kelayakannya karena hal ini merupakan salah satu syarat pelepasan galur/rumpun ternak dalam upaya pengembangan usaha.

INOVASI BIBIT UNGGUL PETERNAKAN

Sebagai salah satu pusat keragaman genetik ternak di dunia, posisi strategis Indonesia untuk menghasilkan berbagai hasil inovasi riset memerlukan dukungan kebijakan pengelolaan pemanfaatannya. Riset peternakan menghadapi tantangan untuk memastikan inovasi menjadi jawaban atas kebutuhan *stakeholder* sehingga memberikan manfaat yang signifikan dirasakan oleh masyarakat. Melalui perakitan sumber daya genetik, Badan Litbang Pertanian telah berkontribusi menghasilkan 12 galur/rumpun baru ternak yang adaptif dengan agroklimat Indonesia melalui SK Menteri Pertanian, dimana pada tahun 2021 telah dilepas juga Ayam Gaosi-1 Agrinak dan Ayam KUB Janaka Agrinak masing-masing berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.

692/KPTS/PK.040/M/11/2021 dan Keputusan Menteri Pertanian No. 768/KPTS/PK.020/M/12/2021.

Hasil inovasi peternakan yang telah dilepas terdiri dari berbagai komoditas yang mewakili masing-masing jenis ternak utama dengan tujuan pemuliaan tertentu. Hasil inovasi tersebut dirangkum di dalam Tabel 1. Pada komoditas ayam lokal, implementasi pemanfaatan keragaman genetik dilakukan dengan strategi pembentukan bibit *Grand Parent Stock* (GPS) maupun *Parent Stock* (PS) ayam lokal melalui seleksi *pure line* dan 4 ways *crossing* dari *pure line* yang sudah ditentukan sehingga prediksi pembentukan GPS ayam lokal dapat dilakukan (Sartika 2012). Saat ini, Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan ayam KUB, Sensi Agrinak, Gaosi dan Janaka sebagai galur ayam lokal unggul. Per Juli 2020, sebaran ayam KUB telah mencapai 33 wilayah provinsi di seluruh Indonesia. Populasi sebaran telah mencapai 1.839.664 ekor dengan persentase terbesar berada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tahun 2018 dan 2019 menjadi puncak momentum diseminasi dan popularitas ayam KUB-1 secara nasional sebagai dampak dicanangkannya Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) oleh Kementerian Pertanian. Ayam KUB menarik minat masyarakat sebagai ayam lokal unggulan dengan potensi yang cukup tinggi akibat adanya pangsa pasar tertentu untuk produk ayam lokal. Hal ini ditandai dengan kemunculan peternak-peternak baru dan tingginya permintaan bibit di beberapa wilayah. Provinsi Jawa Tengah misalnya, popularitas ayam KUB-1 telah berhasil menciptakan iklim wirausaha mandiri bagi para peternak binaan BPTP Jawa Tengah yang membentuk Perkumpulan Peternak Ayam KUB (aNAK aKUB) dan telah berbadan hukum sejak tahun 2020. aNAK aKUB berkembang dengan membawahi 9 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang berkedudukan di Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Kudus (Priyanti et al. 2020).

Bibit unggas lokal lainnya yang memiliki prospek pasar cukup baik adalah itik yang diproduksi oleh Balai Penelitian Ternak (Balitnak). Sampai tahun 2019, Balitnak telah memproduksi 41.596 ekor bibit itik dan telah disebar ke 6 provinsi baik melalui lembaga pemerintah maupun perorangan. Ke-enam provinsi wilayah sebaran tersebut adalah Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Karawang, Bekasi, Cianjur, dan BB Padi); Jawa Tengah (Polbangtan Magelang); Jawa Timur (BPTP Jawa Timur); Lampung (BPTP Lampung); Sumatera Utara (Medan); dan Sulawesi Selatan (Mamuju) (Kostaman et al. 2020).

Tabel 1. Inovasi bibit unggul ternak Balitbangtan

Rumpun/galur	Keunggulan	SK Pelepasan Keputusan Menteri Pertanian
Ayam KUB	Rataan produksi telur: 160-180 butir/ekor/tahun; Umur bertelur pertama: 20-22 minggu; Bobot badan dewasa: 1200-1600 gram; Produksi telur 50%	274/Kpts/SR.120/2/2014
Domba Compass Agrinak	Relatif tahan terhadap serangan cacing <i>Haemonchus contortus</i> ; Rataan litter size: 1,3-1,6 kg/induk; Rataan bobot lahir: 2,8±0,7 kg; Bobot badan umur 11 bulan: 30 kg	1050/Kpts/SR.120/10/2014
Itik Mojomaster Agrinak	Perkawinan pejantan dengan Alabio betina akan menghasilkan itik Master dengan produksi telur tinggi (74% per tahun) umur pertama bertelur relatif cepat (4-5 bulan), dan pemisahan DOD jantan dan betina dapat dilakukan dengan mudah berdasarkan warna bulu	360/Kpts/PK.040/6/2015
Itik Alabimaster Agrinak	Rataan produksi telur: 265 butir/tahun; Masa produksi telur: 10-12 bulan/siklus; Pertumbuhan lebih cepat tanpa rontok bulu; Kematian relatif rendah	360/Kpts/PK.040/6/2015
Ayam Sensi Agrinak	Bobot dewasa jantan: 2381 gram; Bobot dewasa betina: 1528 gram; Produksi telur: 52%	39/Kpts/PK.020/1/2017
Kelinci Rexsi Agrinak	Bobot lahir: 55 gram/ekor; Bobot umur 6 minggu: 652 gram; Jumlah anak sekelahiran: 6-8 ekor; Bobot induk: 2.932,13 gram/ekor; Bobot pejantan: 2.744 gram	303/Kpts/SR.120/5/2017
Domba Bahtera Agrinak	Bobot badan umur 12 bulan: 21 kg; Jumlah anak sekelahiran: 1,5 ekor/induk; Tidak mengenal musim beranak; Adaptif di daerah tropis; Umur pubertas: 306 hari	06/Kpts/PK.040/M/1/2020
Domba Komposit Garut	Kisaran bobot lahir: 2,85 – 3,04 kg; Bobot umur setahun: 29,96 – 35,45 kg; Jumlah anak sekelahiran: 1,5-1,8 ekor/induk	07/Kpts/PK.040/1/2020
Kambing Boerka Galaksi Agrinak	Adaptif terhadap berbagai agroklimat; Toleran pakan berkualitas rendah; Pertambahan bobot badan harian: 120 gr/ekor/hari; Bobot dewasa jantan: 45-55 kg; Bobot dewasa betina: 35 kg	08/Kpts/PK.040/1/2020
Kelinci Reza Agrinak	Bobot badan umur 20 minggu: 2.860 gram; Jumlah anak sekelahiran: 5,87 ekor/induk; Bobot sapih: 553 gram/anak; Umur kawin betina: 5-6 bulan; Umur bibit jantan: 6-7 bulan	09/Kpts/PK.040/M/1/2020
Itik PMp Agrinak	Bobot umur 10 minggu: 2,2-5,0 kg; Rataan produksi telur selama 6 bulan: 73-76%	10/Kpts/PK.040/M/1/2020
Sapi POGASI Agrinak	Adaptif terhadap pakan marjinal; Pertambahan bobot badan harian: 0,8-0,9 kg/ekor/hari; Persentase karkas: 0,9%; Post partum estrus: 77 hari; dan Bobot lahir: 25,5 kg/ekor	07/Kpts/PK.040/M/1/2020

Sumber: Tiesnamurti (2020)

Komoditas ruminansia kecil yang telah dihasilkan adalah kambing Boerka Galaksi Agrinak, domba Compass Agrinak, domba Komposit Garut Agrinak, dan domba Bahtera Agrinak. Kambing Boerka Galaksi Agrinak yang dilepas tahun 2020 misalnya, merupakan bibit unggul hasil perakitan oleh Loka Penelitian Kambing Potong. Sampai tahun 2020, Kambing Boerka Galaksi Agrinak telah disebar dengan jumlah populasi mencapai 1.167 ekor ke 19 provinsi yakni: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Komoditas ruminansia besar diwakili hasil inovasi dari Loka Penelitian Sapi Potong yang diberi nama Sapi POGASI Agrinak. Selama periode 2015-2020, Sapi POGASI Agrinak telah didiseminasikan ke 13 provinsi dengan jumlah sebaran 467 ekor, terdiri dari 100 ekor pejantan dan 367 ekor betina. Wilayah sebaran selama periode tersebut meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Jumlah sebaran tertinggi berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yakni 43% dari total sebaran yang telah dilakukan.

Sejak dimulainya kegiatan penelitian pemuliaan pada awal tahun 2000-an, secara umum diseminasi dan adopsi hasil riset bibit unggul peternakan relatif rendah. Pengalaman empiris seringkali menunjukkan terputusnya rantai diseminasi karena adopsi yang melambat dan tidak berkelanjutan. Sarwani et al. (2016) menyatakan bahwa lambatnya adopsi dan keberlanjutan penerapan inovasi harus dapat disikapi dengan mencoba mengubah paradigma diseminasi dan operasionalisasi prosesnya dengan lebih efektif dan efisien. Penekanan pentingnya inovasi untuk sampai ke pengguna harus dikoreksi dengan indikator *time frame* yang jelas. Diseminasi selama ini memberikan beberapa pembelajaran penting yakni: (i) tidak terjadi akumulasi pengalaman atas berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan yang disebabkan oleh tidak jelasnya keterkaitan kegiatan dengan kegiatan sebelumnya karena setiap kegiatan cenderung dideklarasikan sebagai kegiatan baru; (ii) porsi yang kecil pada inisiatif lokal (BPTP) untuk menginisiasi pola atau pendekatan spesifik lokasi karena kegiatan cenderung dibuat seragam; (iii) rendahnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dari program yang dilaksanakan dan banyak justru terjebak dalam pendekatan proyek; (iv) untuk jenis inovasi yang berbeda, diseminasi dilakukan dengan kecenderungan yang sama; (v) dukungan *data base* dan dokumentasi yang masih lemah; (vi) kurang

terencananya keterkaitan agenda pengkajian dan diseminasi termasuk pengkajian percepatan diseminasi inovasi; (vii) paradigma pelaksana di BPTP yang memandang pengkajian sebagai kegiatan proyek; dan (viii) *communication in linkages* antar *stakeholder* yang masih lemah mulai dari Balit-balit Nasional dan BPTP maupun antara BPTP dengan *stakeholder* di lapangan. Seringkali, kegiatan berakhir dengan pola dan hasil yang sama akibat tidak adanya pembelajaran dari kegiatan sebelumnya.

STRATEGI HILIRISASI DAN BUKTI EMPIRIS DI LAPANG

Model pembibitan ayam lokal 3 strata

Unggas lokal, utamanya ayam lokal, mempunyai prospek yang sangat baik dan mempunyai pangsa pasar khusus (*niche market*) karena cita rasa dagingnya yang gurih dengan konsumen golongan menengah ke atas. Akan tetapi disisi lain, pengembangan sistem produksi unggas lokal menghadapi kendala utamanya terkait dengan keterbatasan bibit unggul. Dalam rangka merespon kondisi tersebut, Badan Litbang Pertanian melalui UPT-nya telah menghasilkan dan melepas beberapa galur unggas lokal diantaranya yaitu galur ayam petelur KUB-1, galur ayam pedaging SenSi-1 Agrinak, galur itik petelur Alabimaster-1 Agrinak, galur itik pedaging Mojomaster-1 Agrinak, galur itik pedaging PMp, galur ayam KUB-2, dan galur ayam pedaging Gaosi-1 Agrinak.

Bibit ayam lokal merupakan salah satu yang sangat berperan dalam keberhasilan usaha, dimana ketersediaannya relatif terbatas di lapang. Kemampuan penyediaan bibit ayam lokal harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam SNI, sehingga perlu adanya struktur produksi bibit ayam lokal melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* terkait. Untuk itu, Badan Litbang Pertanian (cq. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan) telah menyusun 3 (tiga) skenario perbibitan ayam lokal, yang dikenal dengan Model Pembibitan 3 Strata, yakni: Strata-1, Strata-2, dan Strata-3. Model usaha pembibitan ini harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten, sehingga keberlanjutan usaha dapat dilaksanakan dengan baik.

Strata 1 merupakan model pembibitan dengan kondisi terkontrol, sehingga dapat diperoleh kinerja yang dihasilkan relatif sama dengan kinerja ayam yang dihasilkan oleh Balai Penelitian Ternak (Balitnak). Dalam hal ini, Balitnak menjadi UPT yang memimpin BPTP-BPTP yang mengembangkan Model Pembibitan Strata 1, dengan kapasitas 1000 ekor induk. Tata kelola pembibitan ini dimulai dari manajemen perkawinan, pemeliharaan secara intensif pada umur 0-10 minggu,

pemeliharaan fase pertumbuhan 10-24 minggu dan pemeliharaan ayam dewasa produktif. Demikian pula halnya dengan aspek pemberian pakan, pencegahan dan pengendalian penyakit yang harus mengacu pada petunjuk teknis budidaya yang disusun oleh Balitnak. Sarana *biosecurity* menjadi suatu pra-syarat yang harus dipenuhi dalam Model Strata 1, dan Balitnak telah diusulkan untuk menjadi UPT yang dapat memperoleh sertifikat kompartemen bebas *Avian Influenza*. Produk yang dihasilkan oleh Model Strata 1 adalah DOC dengan kinerja yang relatif standar, diantaranya bobot badan DOC (ayam umur sehari) minimal 26 gram per ekor.

Guna memudahkan akses masyarakat terhadap penyediaan bibit unggul ayam lokal ini, maka Strata-1 juga dibangun pada BPTP-BPTP potensial dan dikembangkan seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ayam di beberapa lokasi di BPTP sejak tahun 2017. Tata kelola pembibitan ayam lokal di BPTP-BPTP ini harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Balitnak sebagai UPT yang memimpin BPTP-BPTP. Hingga tahun 2020 telah dibangun Model Pembibitan Ayam Lokal Strata-1 di 12 BPTP yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni BPTP Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Model pembibitan Strata 2 dirancang untuk menjadi laboratorium lapang bagi para peternak pembibit atau penangkar dalam mengaplikasikan inovasi ayam lokal dari UPT Balitbang Pertanian. Hal ini merupakan salah satu strategi dalam mendiseminasikan hasil inovasi secara langsung kepada pengguna, sekaligus untuk memperoleh umpan balik dalam upaya penyempurnaan riset di masa yang akan datang. Strata 2 adalah model pembibitan dan pengembangan ayam lokal unggul di masyarakat yang dilaksanakan oleh peternak Inti dan peternak Plasma. Strata-2 telah dibangun di 19 provinsi dengan kapasitas kandang ayam dewasa masing-masing sebanyak 300 ekor di peternak Inti dan 300 ekor ayam di peternak Plasma. Peternak Inti merupakan peternak pembibit yang dalam usaha ternaknya menghasilkan DOC ayam lokal unggul. Sementara itu, peternak Plasma adalah peternak budidaya yang melakukan usaha ternak ayam lokal unggul yang dalam usahanya menghasilkan ayam lokal siap potong dengan umur panen 10 minggu. DOC dari peternak Inti diproduksi untuk mensuplai kebutuhan peternak Plasma atau peternak lainnya yang memerlukan. Peternak Inti dibangun untuk memperbanyak pembibit dan pensuplai DOC ayam lokal unggul, sehingga suplai DOC tidak sepenuhnya berasal dari Strata-1 BPTP. Strata 2 dibangun di provinsi dimana terdapat Strata 1 BPTP. Salah satu parameter penting yang ingin diperoleh dari model

pembibitan Strata-2 adalah usaha pembibitan dengan skala usaha ekonomi minimal dan usaha budidaya yang berorientasi komersial. Untuk itu, analisis usaha ekonomi menjadi sangat penting untuk dilakukan dan memiliki *output* yang strategis dalam upaya meningkatkan nilai tambah usaha pengembangan ayam lokal bagi kesejahteraan peternak.

Model pembibitan ayam lokal Strata 3 adalah pengembangan ayam lokal unggul di tingkat rumah tangga peternak, dimana masing masing peternak memelihara 20 ekor ayam yang ditujukan sebagai ayam potong (umur 10 minggu). Strata 3 dilaksanakan di wilayah/provinsi yang terdapat Strata-2 sebagai pemasok DOC, dimana masing masing provinsi dirancang terdiri dari 100 peternak. Hal ini ditujukan untuk dapat memberikan penguatan ekonomi bagi peternak rumah tangga yang mempunyai sumberdaya atau lahan terbatas. Lokasi provinsi Strata-3 disandingkan dengan lokasi provinsi Strata-2 dengan maksud agar dapat berkelanjutan dimana suplai bibit DOC ayam lokal unggul bagi peternak rumah tangga nantinya dapat disuplai dari peternak pembibit model Strata 2.

Model bisnis: Holistik dari hulu ke hilir

Terbatasnya ketersediaan bibit menyebabkan pentingnya strategi hilirisasi yang diikuti program pembibitan berjenjang dengan melibatkan peternak pembibit di wilayahnya masing-masing membentuk sistem hilirisasi yang terintegrasi dan masif. Masih rendahnya keberhasilan hilirisasi hasil inovasi bibit unggul ternak juga disebabkan oleh masih belum terintegrasikannya adopsi tahapan inovasi peternakan sejak proses produksi, pengolahan, sampai kepada distribusinya. Selama ini, kegiatan di dalam setiap simpul rantai sosial-ekonomi khususnya di level peternak rakyat sebagai pelaku paling rentan masih bergerak parsial, tradisional, dan kurang mengarah pada upaya peningkatan nilai tambah. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses transfer inovasi dari luar. Padahal, sebagaimana dinyatakan oleh Hanafie (2010) dalam Priyanti et al. (2020), implementasi pemanfaatan hasil riset dalam usaha ternak seharusnya menjadi sistem agribisnis yang dapat didefinisikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dari hulu sampai hilir, dimana keberhasilan pengembangannya ditentukan oleh kemajuan yang dicapai pada setiap simpul yang menjadi subsistemnya.

Salah satu subsistem pendukung yang sangat penting dalam sistem agribisnis adalah kelembagaan. Subsistem kelembagaan menjadi kesepakatan bersama baik secara formal maupun non formal yang mengatur sistem agribisnis untuk mencapai tujuannya. Agar berfungsi dengan optimal, kelembagaan memerlukan

kaitan fungsional yang menghubungkan antar subusaha dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mengintegrasikannya menjadi model bisnis tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing sub usaha. Secara teoritis, agribisnis terbentuk sebagai kelembagaan yang berlandaskan pada ideologi pasar. Maka, pada kondisi normal pemerintah hanya akan memainkan peranan yang rendah (Syahyuti 2004). Pelaku utama dimainkan oleh masyarakat dan swasta yang dengan peranannya masing-masing akan lebih mendorong percepatan peningkatan daya saing ke arah kemandirian yang berkelanjutan.

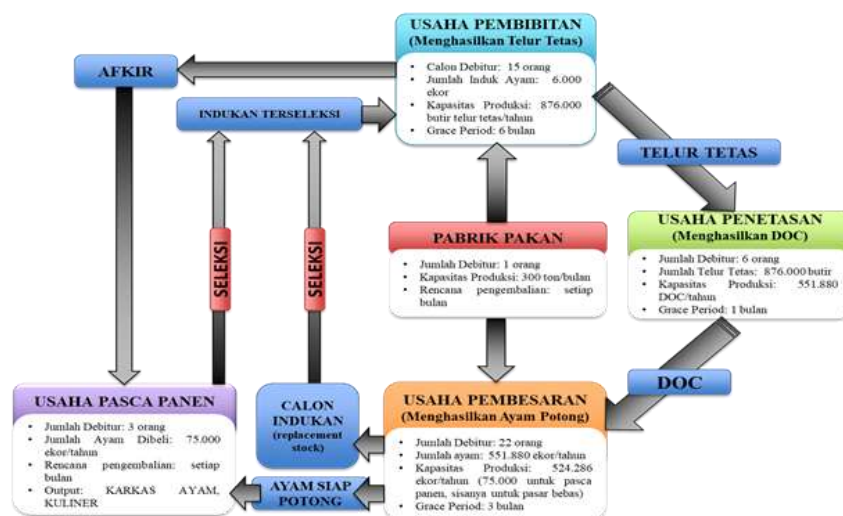
Dalam pengembangannya, model bisnis terintegrasi perlu dilakukan dengan tetap mengutamakan pemberdayaan sumber daya lokal. Diwanto & Priyanti (2009) menyatakan bahwa pengembangan peternakan sebaiknya bertumpu pada potensi, kekuatan dan peluang yang ada sekaligus mempertimbangan tantangan, ancaman dan kelemahannya. Inovasi dari luar harus tetap dipilah dan dicermati untuk menghindari peningkatan produksi yang kontra produktif dengan kesejahteraan peternak kecil.

Selain holistik, model bisnis juga perlu dibangun dengan mempertimbangkan objektivitas usaha. Sebagaimana yang dilakukan pada pengembangan ayam KUB di Jawa Tengah oleh aNAK aKUB misalnya, objektivitas usaha dibangun atas dasar pengalaman, modal sosial, dan potensi spesifik lokasi yang membentuk rantai bisnis yang realistis. Model bisnis disusun membentuk sistem rantai pasok dari hulu sampai hilir yang menggambarkan *supply* dan *demand* di internal Perkumpulan aNAK aKUB dan pasar bebas. Untuk mewujudkan kelembagaan manajemen rantai pasok yang efektif dan efisien,

beberapa tahap awal yang perlu dilakukan, diantaranya adalah: (i) identifikasi pelaku kunci dalam setiap simpul rantai pasok; (ii) analisis peran masing-masing pelaku tersebut di dalam rantai pasok; dan (iii) analisis tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing pelaku terhadap keseluruhan sistem rantai pasok (Saptana & Sartika 2014).

Selanjutnya, pengembangan model bisnis oleh aNAK aKUB yang realistis tergambar ke dalam model spesialisasi DPW berdasarkan pertimbangan potensi, ketersediaan sumber daya, dan minat anggota yang kemudian disepakati bersama-sama. Operasional subusaha dilakukan secara individu oleh peternak di DPW masing-masing namun tetap dalam skema pengelolaan kelompok secara terintegrasi dari hulu sampai hilir di dalam naungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berkedudukan di kota Salatiga. Pengembangan ayam KUB mencakup produksi pakan yang ada di DPP serta produksi DOC (penetasan), pembesaran, produksi telur tetas, produksi indukan, dan pasca panen (karkas dan kuliner) yang terdistribusi di DPW.

Klasterisasi bisnis melalui dasar pertimbangan yang tepat dari hulu sampai hilir bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi usaha. Pada pengembangan itik di Kabupaten Hulu Sungai Utara misalnya, dengan terbentuknya sentra hulu sampai hilir maka setiap koridor distribusi produk dapat menghidupkan dan memberikan budaya inovasi bagi UMKM lainnya yang berada di luar sentra hilir. Konektivitas dari hulu sampai hilir menjadi komponen terpenting di mana pembentukan subterminal agribisnis sebagai pusat pengumpul dengan koperasi yang terlibat sebagai stabilisator harga sekaligus pusat alur distribusi produk (Maulana & Putrayanda 2018).



Gambar 1. Rantai bisnis usaha ayam KUB Perkumpulan Peternak aNAK aKUB

Sumber: Priyanti et al. (2020)

Tabel 2. Hasil analisis kelayakan ekonomi per subusaha pada pengembangan ayam KUB di Jawa Tengah

Subusaha	Skala usaha	Biaya produksi (Rp)	Penerimaan (Rp)	Keuntungan (Rp)	R/C
Pembibitan	1.200 ekor	342.238.040	425.362.500	83.124.460	1,13
Penetasan	100.000 butir	333.618.000	409.500.000	75.882.000	1,23
Pembesaran	8.000 ekor	195.351.000	235.600.000	40.249.000	1,21
Pasca panen	6.000 ekor	225.465.600	270.000.000	44.534.400	1,20
Pabrik pakan	100 ton	390.940.000	470.000.000	79.060.000	1,20

Sumber: aNAK aKUB 2020

Kelayakan ekonomi inovasi bibit unggul ternak

Selama ini, sebagian besar bisnis di subsektor peternakan masih dilakukan secara tradisional. Pencatatan bisnis yang lemah menjadi salah satu karakteristik yang mengikutinya. Hal ini menyebabkan lemahnya evaluasi internal sehingga proses bisnis dijalankan tanpa didasari justifikasi teknis yang jelas. Kondisi tersebut juga menyebabkan analisis kelayakan ekonomi usaha tidak dapat dilakukan dengan baik. Padahal, hasil analisis kelayakan ekonomi menjadi pertimbangan penting baik bagi internal manajemen sebagai bentuk evaluasi usaha maupun bagi pihak luar untuk berbagai kepentingan termasuk pembiayaan. Analisis dan informasi ekonomi diperlukan bagi lembaga keuangan untuk meminimalkan risiko kredit macet atas dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam. Kelayakan ekonomi merupakan hasil analisis secara mikro yang dilakukan lembaga keuangan untuk mempertimbangkan peminjaman dana, di samping analisis ekonomi makro terkait kondisi perekonomian secara nasional (Wiwoho 2014).

Meskipun adopsi hasil inovasi bibit unggul peternakan masih relatif rendah, hasil empiris di lapangan untuk beberapa komoditas utama telah menunjukkan hasil positif. Pengembangan ayam KUB di Jawa Tengah oleh aNAK aKUB misalnya yang mencakup subusaha pembibitan, penetasan, pembesaran, pasca panen, dan pabrik pakan. Keseluruhan subusaha tersebut menghasilkan nilai R/C masing-masing 1,13; 1,23; 1,21; 1,20; dan 1,20. Artinya, pengembangan usaha ayam KUB pada masing-masing subusaha layak secara ekonomi untuk dijalankan ($R/C > 1$). Analisis usaha tersebut saling berbeda, menyesuaikan dengan skala usaha sesuai dengan karakteristik masing-masing subusaha. Analisis ekonomi untuk ayam KUB juga telah dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Barat yang tidak terpisah antar subusaha. Melalui pendekatan rasio R/C, usaha ayam KUB juga layak diusahakan dan menguntungkan dengan hasil R/C sebesar 2,76 dalam satu siklus produksi (18 bulan) (Isbandi & Agustina 2015). Sama halnya dengan di Jawa Tengah, secara umum pengembangan ayam KUB di NTB juga menunjukkan potensi pemasaran yang luas namun

masih terkendala pada terbatasnya ketersediaan jumlah indukan untuk memenuhi permintaan. Kajian terbaru lainnya dilakukan oleh Soekardono et al. (2021) pada usaha kampung unggul ayam Arab dan KUB di kawasan kampung unggas Desa Turuwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Usaha pengembangan dua jenis ayam unggul tersebut dilakukan dalam kajian sekaligus, menghasilkan rasio B/C sebesar 1,36 untuk skala <500 ekor dan 1,31 untuk skala >500 ekor dengan masing-masing tingkat rentabilitas usahanya adalah 35,99% dan 33,46% atau masuk ke dalam kategori rentabilitas rendah. Analisis kelayakan usaha pada komoditas itik banyak dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan, dimana Hamdan & Zuraida (2007) melaporkan bahwa pada pengusaha itik Alabio petelur dengan skala usaha 300 ekor untuk satu siklus produksi 5 bulan, diperoleh total penerimaan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai R/C sebesar 1,28 yang berarti usaha tersebut layak dijalankan. Usaha ternak itik dapat memberikan kontribusi pendapatan sampai dengan 58% dari total pendapatan keluarga (Zuraida 2004 dalam Suryana 2013).

Sementara itu, studi kelayakan untuk komoditas domba dan kambing banyak dilakukan salah satunya di wilayah Sumatera Utara. Rahman et al. (2017) melaporkan bahwa usaha ternak domba di Kabupaten Asahan menunjukkan kelayakan secara ekonomi untuk dijalankan dengan NPV positif, rasio B/C 1,8 dan IRR sebesar 21% ($> discount\ rate\ 12\%$). Masih di wilayah kabupaten yang sama, analisis lain dilakukan dengan mencoba melihat perbedaan antara usaha ternak kambing pada peternak kooperator dan non kooperator. Hasilnya, usaha ternak pada peternak kooperator menghasilkan kelayakan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan non kooperator, masing-masing dengan rasio B/C 1,4 dan 1,2 (Rusdiana & Hutasoit 2014).

Peternakan melibatkan upaya mengubah sumber daya finansial menjadi produk kapital menguntungkan yang biasanya diperoleh setelah beberapa periode. Oleh karenanya, selain aspek kelayakan, hal lain yang menjadi perhatian pemberi modal adalah pengembalian investasi atau pinjaman (*payback period*). Parameter-

parameter ekonomi tersebut dapat bersifat spesifik lokasi untuk masing-masing komoditas.

FASILITASI PEMBIAYAAN INOVASI BIBIT UNGGUL PETERNAKAN

Selama ini, model bisnis pengembangan inovasi bibit unggul ternak belum cukup terjangkau oleh perbankan. Untuk kemudahan aksesibilitas permodalan dari perbankan, industri peternakan harus terintegrasi secara inklusif mulai dari hulu sampai hilir sebagai penjamin pasar produk dan memiliki skala usaha yang mencapai kelayakan ekonomi. Dalam rangka penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak, pemerintah telah mengupayakan penyediaan skema kredit: KUR mikro, KUR kecil dan KUR khusus peternakan rakyat dengan bunga 6%/tahun dan *grace period* sesuai karakteristik usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, disebutkan bahwa KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Pada umumnya, fasilitas KUR dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dan sudah banyak dilakukan evaluasi kinerjanya yang lebih banyak di sektor jasa dan perdagangan (Sujarweni & Utami 2013; Lastina & Budhi 2018). Alokasi KUR untuk sektor produksi pertanian baru mulai digalakkan pada 2-3 tahun terakhir (Panekenan et al. 2016), termasuk juga produksi pada komoditas peternakan. Hal ini sangat dipahami karena komoditas peternakan memiliki risiko usaha yang cukup besar dengan karakteristik usaha saat ini yang masih didominasi oleh peternak rakyat. Pada umumnya peternak rakyat masih sangat jauh terhadap akses perbankan, sehingga sosialisasi KUR ini masih harus terus dilakukan secara konsisten. Puslitbangnak turut berkontribusi dalam menyosialisasikan program ini dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha peternak rakyat. Sebagai contoh, Puslitbangnak telah mendampingi dan mengawal aNAK aKUB untuk menyusun konsep *business plan* model usaha Ayam KUB secara holistik berdasarkan data empiris dengan berbagai divisi usahanya dan mengawal hingga pengusulan proposal ke bank penyalur KUR.

Ruang lingkup model bisnis pengembangan usaha ayam KUB melalui mekanisme KUR meliputi: (i) Pembibitan dan penetasan penghasil DOC; (ii) Pakan berbasis sumberdaya lokal; (iii) Produk daging atau telur konsumsi; dan (iv) Pascapanen berupa *supply* terhadap distributor, gerai/restoran atau pelaku usaha

pengepul. Usaha perbibitan dirancang untuk 10 peternak/kelompok dengan populasi indukan sebanyak 300 ekor dengan masa pemeliharaan selama 18 bulan, produksi telur 4000 butir/bulan. Usaha penetasan dilakukan oleh satu peternak dengan skala relatif besar, yaitu 40 ribu butir telur/bulan (sehingga diperlukan 10 kelompok pembibit). Usaha pabrik pakan berbasis sumberdaya lokal dibangun terintegrasi dengan pengembangan ayam KUB dengan kapasitas minimal 300 ton/bulan. Usaha produksi daging dan telur ayam dengan lama pembesaran selama 70 hari, akan dihasilkan 40 ribu ekor/periode (panen 4 kali/tahun). Adapun usaha pascapanen dilakukan bekerja sama dengan gerai/*outlet*/restoran berbahan baku ayam lokal yang semakin berkembang, jumlah produksi/ketersediaan bahan baku dari model perbibitan yang harus diserap mencapai 30 ribu ekor/bulan. Penyerapan hasil panen produksi ayam oleh *off-taker* menjadi kunci penjamin bagi usaha produksi berkelanjutan di sektor pembibitan.

Atas kinerja KUR yang menunjukkan tren semakin baik, pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi seiring dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi Covid-19. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022, salah satu relaksasi kepada penerima KUR diberikan dalam bentuk subsidi bunga menjadi 3% dari semula 6% (Kemenko Ekon 2022). Relaksasi kebijakan KUR menjadi upaya pemerintah untuk hadir dalam mengakselerasi PEN yang lebih masif. Porsi KUR diupayakan akan terus meningkat dengan target porsi kredit perbankan terhadap UMKM sebesar 30% pada tahun 2024. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat suportif mengingat tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap peningkatan permintaan terhadap KUR yang akan berdampak pada peningkatan produksi pertanian (Nurjanah & Suryantini 2019).

Dalam pemanfaatannya, program KUR perlu ditinjau kembali tentang peluang dan prosedurnya. Hal demikian juga terkait dengan besaran plafon yang diluncurkan, suku bunga, jenis, dan jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebutuhan penerima (peternak). Permasalahan yang umum terjadi adalah sulitnya peternak untuk memenuhi kriteria persyaratan dalam proses pengajuan KUR. Hal tersebut terkait dengan persoalan akses, prospek usaha dan aspek kelembagaan yang nantinya berpengaruh terhadap potensi keberhasilan sistem usaha ternak (*business plan*) yang dibangun, sehingga perlu disiapkan dengan penuh kehati-hatian agar mampu berkembang dan berkelanjutan.

Dalam pemanfaatan KUR peternakan, keberhasilan model bisnis sangat ditentukan oleh objektivitas usaha yang dibangun. Seringkali, usaha telah layak secara ekonomi namun tidak dapat

diterapkan dan tidak mampu berkembang secara berkelanjutan. Oleh karenanya, model bisnis harus realistis dan didukung suatu kebijakan termasuk pengembangan kelembagaan yang memberikan peluang usaha berkelanjutan. Keberhasilan dapat dicapai salah satunya dalam penentuan skala usaha dirancang memenuhi persyaratan skala ekonomis, sehingga mampu dicapai kebutuhan hidup layak dan mampu menciptakan arus kas yang layak secara ekonomi untuk keberlanjutan usaha. Secara bersamaan, usaha perlu dilakukan dari hulu sampai dengan aspek hilir dalam bentuk usaha koperasi dengan manajemen profesional. Pada tahap awal dalam realisasi *business plan* perlu disusun dokumen tertulis yang memuat secara rinci tujuan dan rekomendasi untuk mencapai tujuan tersebut (jangka pendek, menengah maupun jangka panjang). Untuk tujuan mendapatkan pendanaan dan dukungan fasilitas perlu disusun *business plan* operasional dan strategis diarahkan pada aspek visi, misi dan sasaran dan strategi jangka panjang. Untuk menjamin kelayakan agar *business plan* dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan berkelanjutan, diperlukan kajian tentang analisis potensi wilayahnya. Lokasi terpilih adalah wilayah yang cenderung memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*), serta dukungan sumberdaya pakan sebagai pendukung produktivitas ternak yang dikembangkan. Rancangan rekayasa sosial untuk mengaitkan *linkage* dari setiap titik usaha perlu dipertimbangkan dalam menyusun *business plan* ini, terintegrasi tidak hanya secara vertikal tetapi juga horisontal.

Proporsi modal kerja dan modal pinjaman dalam sebuah model bisnis juga sangat penting dalam mempengaruhi keberlanjutan usaha. Proses pengembangan pada aNAK aKUB dengan model bisnis pengembangan ayam KUB pada skala usaha indukan, pembesaran, penetasan, dan pasca panen masing-masing sejumlah 6.000 ekor; 551.880 ekor; 876.000 butir; dan 75.000 ekor diperlukan modal sebesar Rp 19.783.715.000, dimana Rp 17.888.715.000 di antaranya merupakan modal kerja dan sisanya dipenuhi dari pinjaman. Struktur modal tersebut menghasilkan rasio lancar (*current ratio*) sebesar 9,44 yang berarti aNAK aKUB mampu menutup kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih secara keseluruhan sebanyak 9,44 kali atau tergolong sangat baik (aNAK aKUB 2020). Selain rasio likuiditas, keberlanjutan usaha juga penting dipertimbangkan berdasarkan perputaran kas (*cash flow*). Siregar et al. (2020) menyatakan bahwa kecukupan jumlah kas tidak boleh kurang dari 5% - 10% dari jumlah aktiva lancar untuk menyatakan suatu usaha memiliki tingkat likuiditas yang baik. Dalam kondisi tersebut, suatu usaha akan memiliki risiko kecil untuk dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

DUKUNGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN

Kemudahan akses dan jaminan usaha

Pengembangan usaha peternakan rakyat masih banyak terperangkap di dalam titik keseimbangan rendah (*low equilibrium trap*). Oleh karenanya, usaha pengembangan dapat dilakukan dengan lebih berfokus pada akselerasi pertumbuhan yang dimaksudkan untuk pengentasan usaha dari perangkap tersebut menjadi lebih progresif secara mandiri (Aedah et al. 2017). Kemandirian menjadi pengungkit berkesinambungan menuju usaha ternak komersial sebagai hasil dari siklus usaha yang berdaya saing. Aksesibilitas peternak terhadap input-output produksi dan faktor pendukungnya karena relatif kecilnya skala usaha dan lemahnya kapasitas menjadi salah satu faktor pembatas dalam kejadian *low equilibrium trap* ini. Pada umumnya usaha peternakan rakyat merupakan hasil budaya turun temurun menjadi satu kesatuan di dalam tata kehidupan masyarakat. Namun, menilik lebih jauh hal tersebut sekaligus dapat menjadi faktor pendukung penilaian kelayakan usaha saat pengajuan pembiayaan kepada lembaga pembiayaan formal. Durasi usaha menjadi gambaran atas konsistensi dan ketekunan peternak dalam menjalankan usahanya (Asnawi et al. 2020).

Kebijakan pembiayaan rantai nilai terhadap peternak rakyat menurut Fakudze & Machethe (2015) terbukti mampu menjadi solusi yang kuat, realistis, dan layak terutama jika diikuti oleh produk asuransi ternak. Namun, pembiayaan ini tidak cukup efektif jika tidak disertai oleh mekanisme untuk mengantisipasi potensi gagal bayar dan target yang tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat diperbaiki melalui pemantauan partisipatif sehingga penyediaan skim pembiayaan tertentu tidak hanya memastikan bahwa pembiayaan formal diberikan kepada sasaran yang paling membutuhkan, namun juga membantu bahwa pembiayaan tersebut memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan usaha peternakan rakyat.

Secara empiris, pertanian skala kecil masih terus mengalami rekapitulasi yang buruk meskipun produksi pertanian telah banyak menjadi prioritas kebijakan. Berbagai literatur masih menunjukkan bahwa atensi sebagian besar peneliti pun masih kurang dalam penjelasan seperti masih adanya permasalahan dari sisi keterbatasan akses pembiayaan formal oleh para pelaku mikro dan bagaimana hal tersebut berdampak pada upaya komersialisasi (Fakudze & Machethe 2015). Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong kemudahan akses dan jaminan usaha, mendorong operasional usaha secara berkelompok, serta pendampingan dan asistensi dalam perencanaan

proses bisnis, pengusulan pembiayaan, sampai dengan peningkatan kapasitas manajemen.

Pengembangan usaha secara berkelompok

Usaha ternak secara individu pada skala kecil dan menengah menyebabkan sulitnya akses peternak terhadap sumber-sumber pembiayaan formal. Disamping tidak efisien, pembiayaan terhadap peternak rakyat secara individu juga menghadapi keterbatasan terhadap kesanggupan peternak untuk menyediakan agunan. Oleh karenanya, kemudahan akses pembiayaan formal salah satunya mensyaratkan proses bisnis yang dilakukan secara berkelompok. Di sisi lain, sampai saat ini kesadaran peternak untuk melakukan kerja secara berkelompok masih cenderung rendah dan masih sangat menggantungkan pada peran ketua atau tokoh tertentu sebagai pusat penentu operasional kelompok. Tantangan lainnya sebagaimana dilaporkan oleh Ashari (2009) adalah sulitnya menentukan ketua kelompok (pengurus) yang benar-benar beritikad baik dan jujur dalam prasyarat berkelompok untuk mendapatkan akses kredit.

Kesadaran akan pentingnya usaha secara berkelompok menjadi inti untuk mengoptimalkan peran kelompok sebagai wahana kerja sama dan kelompok usaha, bukan sebatas kelas belajar dan unit produksi. Sebagai kelompok usaha, kelompok menjadi satu kesatuan usaha untuk memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan dengan dua indikator utama yakni fasilitasi permodalan dan pemasaran. Adapun peran kelompok sebagai wahana kerja sama adalah mewadahi anggotanya untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan kelompok, permodalan, dan interaksi dengan pihak luar dalam kerangka peningkatan produksi anggotanya (Sayaka & Rivai 2011). Kelembagaan dalam bentuk kelompok juga menjadi rekomendasi untuk mendapatkan fasilitasi akses pada lembaga keuangan dengan mekanisme tanggung renteng bagi usaha peternakan dengan kategori *feasible* namun belum *bankable* (Sodiq et al. 2017).

Pendampingan dan asistensi penyusunan usulan kredit

Kredit berperan penting dalam memperlancar pembangunan pertanian, termasuk usaha peternakan yang didominasi oleh usaha peternakan rakyat. Beberapa hal pentingnya kredit ini adalah untuk: (i) membantu permodalan petani kecil dengan bunga yang relatif rendah; (ii) mengurangi ketergantungan

petani terhadap perantara sehingga memperbaiki struktur pemasaran hasil pertanian; (iii) mendorong pemerataan melalui mekanisme transfer pendapatan; dan (iv) insentif bagi petani dalam peningkatan produksi. Disamping memperlancar pembangunan, kredit juga menjadi simpul titik kritis pembangunan yang efektif sebagai penunjang dalam perluasan dan penyebaran adopsi teknologi (Ashari 2009).

Dukungan peningkatan produktivitas peternak melalui peningkatan akses pembiayaan memerlukan pengkajian yang holistik tentang karakteristik sistem agribisnisnya yang spesifik lokasi. Sistem agribisnis pada subsektor peternakan melibatkan makhluk hidup sebagai objek, berkaitan erat dengan alam, dan memiliki karakteristik-karakteristik tertentu pada proses bisnis sejak usaha pembibitan sampai dengan pascapanen. *Endowment factor* tersebut harus dapat diinventarisir dan dituangkan dengan baik dalam sebuah dokumen usulan yang menjadi rangkuman proses bisnis. Proses tersebut masih terkendala karena konsekuensi pengelolaan usaha kapasitas manajemen yang terbatas sehingga menyebabkan lemahnya dokumentasi proses bisnis. Hal ini menyebabkan sulitnya akses pembiayaan karena pengajuan pembiayaan tidak disertai analisis kelayakan usaha yang menguntungkan dan realistis sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan. Oleh karenanya, diperlukan dokumentasi proses produksi dengan koefisien teknis yang jelas dan konsisten dari waktu ke waktu. Aspek penting lainnya dalam penyusunan usulan pembiayaan sebagaimana dirumuskan oleh Sayaka & Rivai (2011) adalah penentuan komoditas yang sesuai dengan permintaan pasar untuk menjamin pendapatan yang diterima sebanding dengan jumlah dana yang dibiayai.

Penuangan proses bisnis ke dalam dokumen usulan pembiayaan biasanya dilakukan dengan format yang telah ditentukan oleh perbankan. Di samping itu, dokumentasi proses bisnis yang sistematis, lengkap, spesifik, dan informatif diperlukan untuk memudahkan penerjemahan oleh perbankan untuk selanjutnya dikonversi ke dalam peluang skim pembiayaan yang tepat. Hal itu tidak cukup sederhana bagi para peternak yang sebagian besar masih berada pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusianya. Secara menyeluruh, pengelolaan usaha dengan pembiayaan perbankan juga banyak memerlukan perhatian pada titik-titik kritis dari model bisnis yang akan dijalankan. Implikasinya, diperlukan program pendampingan yang jelas serta pemahaman dan transparansi pada titik-titik kritis tersebut. Hal itu diperlukan dalam rangka menjamin pemahaman pelaku pada perannya masing-masing demi berjalannya proses bisnis secara berkesinambungan.

KESIMPULAN

Inovasi bibit unggul ternak perlu disebarluaskan secara masal guna mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan protein berbasis ternak, dan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan peternak. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan subsektor peternakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak. Dalam hal ini, aspek pembiayaan untuk dapat diakses oleh pelaku usaha menjadi sangat penting. Program pemerintah yang telah me-*launching* program kredit usaha rakyat (KUR) sangat tepat, dimana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat peternak dalam mengembangkan usaha ternak dengan bibit berkualitas. Sebagai produk perbankan, aksesibilitas KUR menuntut skala usaha yang layak secara ekonomi sehingga jaminan usaha dapat berkesinambungan dengan arus kas (*cash flow*) yang memadai. Di sisi lain, usaha peternakan selama ini masih didominasi oleh pelaku usaha skala rakyat sehingga belum memenuhi kaidah produksi yang berorientasi pada optimalisasi keuntungan. Fasilitas permodalan juga perlu diikuti dengan pendampingan dan asistensi kepada para peternak sebagai calon debitur pengusul KUR guna mempercepat proses perolehan modal bagi peternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedah S, Djoefrie MB, Suprayitno G. 2017. Faktor-Faktor yang mempengaruhi daya saing industri unggas ayam kampung (studi kasus PT Dwi dan Rachmat Farm, Bogor). *Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*. 11:173–182.
- Ashari. 2009. Optimalisasi kebijakan kredit program sektor pertanian di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 7:21–42.
- Asnawi A, Sirajuddin SN, Tenrisanna V. 2020. Beef cattle farming characteristic to formal financing access. *EurAsian J Biosci*. 14:3973–3977.
- [Ditjen PKH] Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2015. Statistik peternakan dan kesehatan hewan 2015. Jakarta (Indonesia): Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- [Ditjen PKH] Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2020. Statistik peternakan dan kesehatan hewan 2020. Jakarta (Indonesia): Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Diwyanto K, Priyanti A. 2009. Pengembangan industri peternakan berbasis sumber daya lokal. *J Pengembangan Inovasi Pertanian*. 2:208–228.
- Fakudze CD, Machethe CL. 2015. Improving smallholder livestock farmers' incomes through value chain financing in South Africa. *Dev Pract*. 25:728–736.
- Hamdan A, Zuraida R. 2007. Profil Usaha Ternak Itik Alabio Petelur pada Lahan Rawa Lebak Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Dalam: Mukhlis, Noor M, Supriyo A, Noor I, Simatupang RS, penyunting. *Revitalisasi Kawasan PLG dan Lahan Rawa Lainnya untuk Membangun Lumbung Pangan Nasional*. Prosiding Seminar Nasional Pertanian Lahan Rawa. Kuala Kapuas, 3-4 Agustus 2007. Banjarbaru (Indonesia) Balittra. hlm. 127–134.
- Isbandi, Agustina N. 2015. Profil dan Analisis Usaha Pembibitan Ayam KUB di Kelompok Peternak Jaya Mandiri Batu Beson, Desa Jago, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam: Noor MN, Handiwirawan E, Martindah E, Widiastuti R, Sianturi RSG, Herawati T, Purba M, Anggraeny YN, Batubara A, penyunting. *Teknologi Peternakan dan Veteriner untuk Peningkatan Daya Saing dan Mewujudkan Kedaulatan Pangan Hewani*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Jakarta, 8-9 Oktober 2015. Jakarta (Indonesia): IAARD Press. hlm. 557–563.
- [Kemenko Ekon] Kementerian Koordinator Perekonomian. 2022. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jakarta (Indonesia): Kementerian Koordinator Perekonomian.
- Kostaman T, Sopiya S, Ds K, Susanti T, Purba M. 2020. Performa dan Penyebaran Itik Unggul Balitbangtan untuk Mempercepat Pembibitan Itik di Masyarakat. Dalam: Kostaman T, Praharani L, editors. *Teknologi Inovatif Peternakan dan Veteriner Menuju Industri Peternakan Maju, Mandiri, dan Modern di Era New Normal*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 26-27 Oktober 2020. Jakarta (Indonesia): IAARD Press. hlm. 512–524.
- Lastina NLM, Budhi MKS. 2018. Efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat PT BRI dan pendapatan UKM penerima KUR di Kecamatan Abiansemai. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 7:959-986.
- Maulana AZ, Putrayanda Y. 2018. Program pengembangan peternakan itik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *J Kebijakan Pembangunan*. 13:57–65.
- Noor Y, Hidayat R. 2017. Menggerakkan produksi Ternak Kambing Domba Berorientasi Ekspor. Dalam: Puastuti W, Muharsini S, Inounu I, Tiesnamurti B, Kusumaningtyas E, Wina E, Herawati T, Hartati, Hutasoit R, penyunting. *Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Diversifikasi Sumber*

- Protein Asal Ternak. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 8-9 Agustus 2017. Bogor (Indonesia): IAARD Press. hlm. 37–47.
- Nurjanah D, Suryantini A. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit program KKPE dan KUR sektor pertanian di Indonesia. *J Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 3:96–107. doi: 10.21776/ub.jepa.2019.003.01.10.
- Panekenan D., Rumagit GAJ, Pangemanan PA. 2016. Peran kredit perbankan pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*. 13:183-194.
- [aNAK aKUB] Perkumpulan Peternak Ayam KUB. 2020. Peningkatan dan pengembangan kapasitas usaha peternak ayam KUB dalam Perkumpulan Peternak aNAK aKUB Jawa Tengah. Salatiga (Indonesia): Perkumpulan Peternak aNAK aKUB Jawa Tengah.
- Priyanti A, Chasanah N, Sinurat AP, Pramono J, Subiharta, Sumali, Inounu I. 2020. Kredit usaha rakyat mendukung pengembangan usaha ayam KUB d Jawa Tengah. Bogor (Indonesia): Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
- Priyanti A, Inounu I, Ilham N. 2017. Pencegahan pemotongan sapi betina produktif melalui tata kelola lembaga korporasi perusahaan daerah. *Wartazoa*. 27:53–66.
- Priyanti A, Zuratih, Tiesnamurti B. 2020. Teknologi Peternakan dalam Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Lokal di Era Industri 4.0. Dalam: Mudawaroch RE, Utami DP, Wicaksono IA, Iskandar F, Windani I, Dhidik AH, penyunting. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Lokal di Era Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Pertanian Peternakan Terpadu Ke-3. Purworejo, 14 Maret 2020. Purworejo (Indonesia): Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purworejo. hlm. 262–277.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2020a. Buku outlook komoditas peternakan daging sapi. Jakarta (Indonesia): Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2020b. Buku outlook komoditas peternakan kambing/domba. Jakarta (Indonesia): Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2020c. Buku outlook komoditas peternakan daging ayam. Jakarta (Indonesia): Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2020d. Buku outlook komoditas peternakan telur ayam ras. Jakarta (Indonesia): Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Rahman A, Sarim, Lubis MM. 2013. Peningkatan daya saing dan analisis kelayakan usaha ternak domba pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Asahan. *J Pengabdian Kepada Masyarakat*. 23:460–467. doi: 10.24114/jpk.m.v23i4.8592.
- Rusdiana S, Hutasoit R. 2014. Peningkatan usaha ternak kambing di Kelompok Tani Sumber Sari dalam analisis ekonomi pendapatan. *J Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 11:151–162. doi: 10.20961/sepa.v11i1.14168.
- Saptana, Sartika T. 2014. Manajemen rantai pasok komoditas telur ayam kampung. *J Manajemen Agribisnis*. 11:1–11. doi: 10.17358/jma.11.1.1-11.
- Sartika T. 2012. Ketersediaan sumberdaya genetik ayam lokal dan strategi pengembangannya untuk pembentukan parent dan grand parent stock. Dalam: Iskandar et al, penyunting. Prosiding Workshop Nasional Unggas Lokal. Bogor (Indonesia): Puslitbangnak. hlm. 15-23.
- Sarwani M, Jamal E, Subagyo K, Sirnawati E, Hanifah VW. 2016. Diseminasi di BPTP: pemikiran inovatif transfer teknologi spesifik lokasi. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 9:73. doi: 10.21082/akp.v9n1.2011.73-89.
- Sayaka B, Rivai RS. 2011. Peningkatan akses petani terhadap kredit ketahanan pangan dan energi. *PSE Litbang Pertanian*. 1:188–208.
- Siregar BG, Matondang Z, Angraini N. 2020. Pengaruh working capital terhadap likuiditas pada PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSAM (JMAS)*. 1:1-13.
- Sodiq A, Suwarno S, Fauziyah FR, Wakhidati YN, Yuwono P. 2017. Sistem produksi peternakan sapi potong di pedesaan dan strategi pengembangannya. *J Agripet*. 17:60–66. doi: 10.17969/agripet.v17i1.7643.
- Soekardono, Yasin M, Fachry A, Taquiuddin, Media IGL. 2021. Performansi ekonomi usaha ayam kampung unggul di kawasan kampung unggas di Desa Turuwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Prosiding Saintek*. 3:9–10.
- Sujarweni VW, Utami LR. 2013. Analisis dampak pembiayaan dana bergulir KUR (kredit usaha rakyat) terhadap kinerja UMKM. [Internet]. Available from: <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1082/1/SKRIPSI893-1705244296.pdf>. 53:1689–1699.
- Suryana. 2013. Pemanfaatan keragaman genetik untuk meningkatkan produktivitas itik Alabio. *J Litbang Pertanian*. 32:100–111.
- Syahyuti N. 2004. Pemerintah, pasar, dan komunitas: faktor utama dalam pengembangan agribisnis di pedesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 22:54. doi: 10.21082/fae.v22n1.2004.54-62.

- Tiesnamurti B. 2020. Prospek Peternakan di Era Normal Baru Pasca Pandemi Covid-19: Pemanfaatan Berkelanjutan Sumberdaya Genetik Ternak sebagai Penyedia Pangan Hewani. Dalam: Susanto A, Santosa SA, Safitri L, Widodo HS, Syamsi AN, Candrasari DP, Harwanto, Hidayat N, Hidayah CN, Nugrogo AP, penyunting. Prospek Peternakan di Era Normal Baru Pasca Pandemi COVID-19. Prosiding Seminar Teknologi dan Agribisnis Peternakan VII. Purwokerto, 27 Juni 2020. Purwokerto (Indonesia): Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman. hlm. 1–14.
- Wiwoho J. 2014. Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat. Masalah-masalah Hukum. 43:87–97.